

Framing Media Terhadap Ulama Di Balik Popularitas Jokowi Dan Prabowo

Raissa Ardianti

Pengajar Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Email: ardiantiraissa@gmail.com

Abstract

The easy access to online media made the electoral progress of Jokowi and Prabowo interesting to be watched. There are many perspectives and facts regarding both candidates that elevate the public's argumentation in the public sphere. However, the easy access of that online media unfortunately had created a bias between both candidates' true modality and the issues behind them. The Islamic value of the Ulama behind both candidates are the most interesting issues of them all. Indonesian society began to pay more attention to Ulama' figure instead of to the modalities both candidates promoted. This writing aims to drive that public partiality about the Ulama through paying more attention to the electability level by affirming Talal Asad's thesis about Ulama and Politics.

Keywords: *media, modalities, Ulama, electability*

Abstrak

Media online yang mudah diakses oleh masyarakat segala kalangan menjadikan pemberitaan terkait kiprah capres Jokowi dan Prabowo menarik untuk disimak. Ragam sudut pandang dan penyajian fakta dikemas dan mengundang argumentasi di ruang publik yang menyoroti dukungan terhadap kedua pasangan calon. Disayangkan akibat kemudahan akses tersebut, masyarakat Indonesia menjadi bias dengan modalitas dari kedua pasangan calon dan justru berfokus kepada isu-isu yang melekat kepada keduanya. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah nilai-nilai keislaman yang dibawa oleh kaum Ulama di balik kedua pasangan calon. Masyarakat lebih fokus untuk memperhatikan lekatnya figur Ulama itu dibandingkan dengan memperhatikan modalitas sesungguhnya dari kedua pasangan calon. Tulisan ini secara lebih lanjut berupaya untuk menggeser ketimpangan pemahaman masyarakat terhadap elektabilitas pasangan calon melalui afirmasi terhadap tesis Talal Asad tentang ulama dan politik.

Kata kunci: *media, modalitas pasangan calon, ulama, elektabilitas*

PENDAHULUAN

Momentum Pemilihan Umum yang terjadi pada tahun 2019 mendatang selalu menarik untuk dibahas. Menentukan “nasib” Indonesia untuk lima tahun ke depan menjadi pemicu bagi masyarakat Indonesia untuk turut ramai memperbincangkan modalitas dari kedua pasangan calon di ruang-ruang publik. Menariknya melalui kemudahan akses terhadap pemberitaan-pemberitaan terkait kiprah kedua pasangan calon yakni Jokowi dan Prabowo, bermunculan berbagai macam tagar-tagar di media sosial yang menunjukkan dukungan maupun serangan kepada kedua pasangan calon.

Masyarakat Indonesia seringkali abai dengan perbedaan antara popularitas dan elektabilitas dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini ditunjukkan melalui maraknya argumen-argumen tidak bertanggungjawab yang saling merendahkan kedua pasangan calon dan beredar di dunia maya. Adapun rangkaian argumentasi asuntif yang marak beredar ialah terkait figur pasangan capres. Terdapat dugaan bahwa dua cawapres pilihan Jokowi dan Prabowo adalah pemanfaatan terhadap momentum. Jokowi yang merangkul Ma'ruf Amin sebagai cawapres dinilai merupakan strategi Jokowi untuk menarik dukungan dari NU yang merupakan Ormas Islam terbesar di Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia dan pengurus dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjadikan Ma'ruf Amin sebagai pemuka dalam Organisasi Masyarakat NU. Untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki Wakil Presiden yang berasal dari kalangan alim ulama.

Berbeda dengan Jokowi, capres Prabowo menggaet milenial Sandiaga Uno sebagai pendamping. Upaya Prabowo untuk merangkul Sandiaga Uno dinilai memanfaatkan peran Gerindra yang merupakan salah satu partai yang berupaya menjatuhkan Ahok dalam kasus penistaan agama. Upaya Prabowo ini rupanya disambut baik oleh Persatuan Alumni 212 dan Gerakan Nasional GNPF sehingga ulama-ulama non-NU di Indonesia menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Sandi. Melalui Ijtima Ulama, GNPF menyatakan dukungannya terhadap Prabowo menjadikan figur Prabowo lekat dengan komitmen terhadap ulama-ulama yang tidak berasal dari ormas NU.

Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres pilihan Jokowi dan dukungan GNPF terhadap Prabowo sering disebut sebagai benturan antar nilai ormas Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa kharisma Ulama di Indonesia masih dipandang sebagai elemen penting yang menentukan popularitas pemimpin Indonesia. Meski demikian apakah nilai-nilai

keislaman yang dibawa oleh baik Ma'ruf Amin maupun GNPF dalam Ijtima Ulama berpengaruh terhadap kedua pasangan calon? Faktanya popularitas kedua pasangan calon juga ditentukan oleh ulama-ulama di balik keduanya. Adanya perbedaan terminologi antara NU dengan Ijtima Ulama merupakan sorotan utama masyarakat terhadap kedua pasangan calon. NU kerap kali disimpulkan sebagai organisasi masyarakat Islam dengan nilai nusantara dan Ijtima Ulama dengan nilai-nilai Islam absolut.

Perdebatan terkait terminologi dan penerapan dari Islam Nusantara yang marak terjadi di kalangan Ulama kerap kali dipicu oleh benturan antar syariat, aturan-aturan praktis dan hal-hal yang mengatur teknis peribadatan. Ulama non-NU umumnya memperdebatkan tentang urgensi dan asal hukum dari ritual-ritual budaya yang dibenturkan dengan ajaran-ajaran dalam Alquran. NU sebaliknya memberikan serangkaian fatwa yang memuat perbedaan tegas antara hal-hal yang syirik dengan hal-hal yang "diperbolehkan". Perbedaan terminologi ini yang seringkali dilekat-lekatkan kepada identitas kedua pasangan calon.

Terlepas dari siapa ulama dibalik kedua pasangan calon dan terminologi apa di balik figur ulama-ulama dibaliknya, mengukur tingkat elektabilitas keduanya hanya bisa dibuktikan melalui survey sementara yang acap dilakukan oleh Lembaga-lembaga survey berdedikasi. Sampai dengan bulan Oktober 2018 melalui berbagai sumber Lembaga Survey didapatkan hasil bahwa pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin unggul di atas pasangan Prabowo dan Sandiaga. Lingkaran Survey Indonesia melaporkan:

Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfarabi mengungkapkan, Jokowi-Ma'ruf dipilih oleh 52,2 persen responden. Sementara elektabilitas Prabowo-Sandiaga 29,5 Persen. Adapun responden yang tidak menjawab mencapai 18,3 persen. "Jokowi telah mencapai magic number di atas 50 persen," ujar Adjie di Kantor LSI Denny JA. Dari enam kantong pemilih yang dianggap penting, Jokowi-Ma'ruf Amin unggul di lima kantong pemilih. Jokowi-Maruf Unggul di Pemilih Wong Cilik, Prabowo-Sandiaga di Kaum Terpelajar Sementara Prabowo-Sandiaga Uno hanya unggul di satu kantong pemilih. Jokowi-Ma'ruf unggul pada pemilih Muslim, pemilih non-Muslim, masyarakat ekonomi rendah, perempuan, dan milenial. Sementara itu, Prabowo-Sandiaga Uno hanya unggul di kantong pemilih kaum terpelajar. Meski hanya unggul di satu kantong pemilih, Prabowo-Sandiaga dinilai masih punya peluang untuk menaikkan elektabilitas. Sebab, Prabowo-Sandiaga unggul pada kantong kaum terpelajar yang dinilai penting karena bisa menjadi pengiring opini. Survei LSI Denny JA dilakukan pada 12-19 Agustus 2018. Metode yang digunakan multistage random sampling di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kepada responden sebanyak 1.200 orang. Adapun margin of error survei LSI Denny JA tersebut 2,9 persen. (Sumber: Yoga Sukmana, www.kompas.com Agustus 2018)

Dapat disimpulkan melalui data Lingkaran Survey Indonesia bahwa masing-masing diantara Jokowi dan Prabowo memiliki keunggulan masing-masing di kantong pemilih meski Jokowi masing unggul di sebagian besar diantaranya. Menariknya, di kantong pemilih muslim, Jokowi unggul atasnya. Selanjutnya diberitakan pula:

Sebelumnya, Djayadi membeberkan hasil sigi SMRC yang menunjukkan bahwa figur cawapres belum memberi pengaruh untuk calon presiden, baik positif maupun negatif. Survei SMRC mencatat, dukungan untuk Jokowi sebesar 60,2 persen, sedangkan Prabowo 28,7 persen. Jika berpasangan dengan cawapres Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, dukungan terhadap keduanya berturut-turut sebesar 60,4 persen dan 29,8 persen, alias tak berubah signifikan.

Djayadi mengatakan, suara pemilih tetap Prabowo saat ini baru berada di kisaran 25-30 persen. Menurut dia, Sandiaga setidaknya harus menggaet 17 persen suara lagi. Angka 17 persen ini setidaknya untuk menyamai hasil pilpres 2014. Ketika itu, pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh suara sebesar 47 persen. (tempo.co)

Berikutnya, Sandiaga harus berupaya keras mengurangi selisih dukungan Prabowo dan Jokowi di segmen masyarakat pedesaan. Sebab, kawasan pedesaan sebelumnya merupakan lumbung suara bagi Jokowi. Menurut Djayadi, Prabowo-Sandiaga memiliki karakteristik pemilih pengguna internet dan media sosial.

"Tugas Sandi membantu mengurangi gap itu. Di kalangan milenial pedesaan yang menggunakan internet, ada peluang bagi Prabowo untuk meraih dukungan," ujarnya. Sementara Sandiaga harus menggaet dan menambah dukungan, Djayadi berpendapat Ma'ruf cukup mempertahankan suara untuk Jokowi. Sebab, kata Djayadi, elektabilitas Jokowi saat ini masih mengungguli Prabowo. Suara-suara pemilih Islam, misalnya, harus dirawat agar tak beralih dari capres petahana itu. Djayadi menyebut itulah yang dilakukan Ma'ruf saat ini dengan berkunjung ke pondok-pondok pesantren dan menemui para kiai.

Tingginya elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf diketahui bukan merupakan ancaman bagi pihak Prabowo-Sandi. Pada level publikasi elektabilitas tidak ada perselisihan diantara keduanya, namun di tingkat ruang publik terjadi adu argumentasi yang menjadi serangan bagi pribadi kedua pasangan calon.

Tahun 2018 merupakan tahun politik yang berat bagi Jokowi dan Prabowo yang diakibatkan oleh serangan-serangan dari dunia maya. Tagar #2019 gantipresiden beredar di dunia maya sebagai ungkapan ketidakpuasan sekelompok masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Jokowi. Melalui media sosial Twitter, Instagram dan Facebook warganet ramai memposting sejumlah pemberitaan yang mengkambinghitamkan gagalnya Presiden Jokowi dalam mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial di Indonesia. Lesunya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan kenaikan harga BBM disebut sebagai contoh konkrit yang diasumsikan sebagai bentuk kegagalan Jokowi.

Naiknya harga BBM yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2018 menambah daftar panjang keterpurukan ekonomi yang seringkali dikait-kaitkan dengan penurunan kerja pemerintah. Meski demikian, harga BBM di Indonesia bisa berbeda pada setiap Provinsi. Rata-rata kenaikan BBM di Pulau Jawa yang dinilai signifikan adalah jenis Pertamina yang naik sebanyak Rp. 900 dari harga Rp. 9500 menjadi Rp. 10.400. Perlu diketahui bahwa naiknya harga BBM dipicu oleh naiknya harga minyak mentah dunia yang mencapai 80 Dolar AS. Detik Finance juga menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM ini berlandaskan dari Permen ESDM nomor 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM (portal berita online detikfinance: Oktober 2018). Selain itu BBM bersubsidi seperti Premium dikabarkan belum mengalami kenaikan.

Sejalan dengan Jokowi, serangan dunia maya juga ditujukan oleh Prabowo. Serangan dunia maya untuk Prabowo dipicu oleh drama politis yang dibesut oleh timses Prabowo sendiri. Tanggal 21 September 2018 ruang publik di media sosial diramaikan dengan pelaporan dari Ratna Sarumpaet terkait dugaan penganiayaan yang dikonfirmasi melalui foto yang beredar. Melalui foto yang beredar, diketahui Ratna Sarumpaet dalam kondisi babak belur dan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kondisi dugaan pengeroyokan yang dialami oleh Ratna Sarumpaet juga diafirmasi oleh pendukung Prabowo yang berasal dari kalangan figur publik.

Dalam rangka merespon serangan warganet terhadap kedua pasangan calon, Majelis Ulama Indonesia (cnnindonesia: 7 agustus 2018) menyebut tagar-tagar tersebut merupakan hal kontraproduktif dan hanya ditujukan untuk memecah belah persatuan Umat Muslim di Indonesia.

Beredarnya asumsi-asumsi masyarakat yang diviralkan melalui media sosial terkait kiprah dari kedua pasangan calon telah mengaburkan masyarakat dari mengamati modalitas kedua pasangan calon yang sesungguhnya. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menggeser batas kekaburan tersebut sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari *media framing*. Adapun asumsi-asumsi dari masyarakat kepada kedua pasangan calon sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media sehingga berdampak kepada tingkat elektabilitas dari kedua pasangan calon. Lebih penting daripada itu, terminologi ulama dan nilai-nilai keislaman di balik kedua pasangan calon pada hakikatnya tidak boleh dilekat-lekatkan dengan modalitas dari kedua pasangan calon.

METODE PENELITIAN: PERAN MEDIA DALAM PERSEPSI AGAMA DAN POLITIK

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pencarian data melalui studi pustaka. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pandangan ahli terkait konseptualisasi *media framing* dalam konteks agama dan politik. Media dalam hal ini portal berita secara daring menyajikan pemberitaan kiprah dari kedua pasangan calon melalui kampanye yang didukung oleh organisasi massa keislaman. Ditampakkan pada kedua pasangan calon bahwa organisasi keislaman di balik keduanya memiliki nilai yang berbeda, yakni Jokowi dengan dukungan NU dan Prabowo dengan dukungan GNPF.

Adapun nilai-nilai yang diusung oleh kedua organisasi keislaman tersebut pada dasarnya bukan menjadi tolak ukur dari modalitas kedua pasangan calon. Lebih penting daripada itu, menjadi salah apabila masyarakat membenturkan nilai-nilai dari NU dan GNPF dalam rangka menilai modalitas kedua pasangan calon. Hal ini membelokkan perhatian masyarakat yang seharusnya terpusat kepada hal-hal lain yang lebih esensial seperti visi dan misi.

Steward M. Hoover (2004) dalam tesisnya yang berjudul “Religion in the Media Age” menyebutkan bahwa media dan agama memiliki hubungan yang saling tidak menguntungkan. Ketika para pemuka agama berupaya untuk menyesuaikan modernitas dengan tetap menjaga kesahihan hukum Tuhan, media terlebih dahulu telah memberikan kesimpulan pergerakan-pergerakan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai “radikalisme” (Hoover: 2004, 10). Adapun pemberitaan di dalam media sangat tergantung kepada artikulasi budaya yang hendak dihasilkan dari media yang bersangkutan.

Hoover mencatat:

These two tendencies – to see the relationship between religion and media in institutional-structural terms on the one hand or in more fundamental, almost organic terms on the other share in common an implicit dualism. They conceive of religion in particular, but also “the media” as coherent, transhistorical, unchanging forms that can be thought of as independent and potentially acting independently upon one another. This dualism holds sway in much of the scholarship that has been devoted to media and religion. From the earliest studies in the 1950s through a flurry of research that followed the emergence of the phenomenon of televangelism in the 1970s, to more recent work on religion and the press, the assumption has been that we can and should look at religion and media as separate realms. (Hoover: 2004, 12)

Peran media dalam mempersepsikan Ulama dan agama pada suatu kondisi disebut Hoover dualis. Di dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, peran kharisma dari

seorang pemimpin merupakan angin segar bagi masyarakat yang dipimpin. Dalam kondisi seperti ini, agama mengisi ruang publik dengan kabar-kabar baik dan hukum Tuhan yang menjanjikan masyarakat kepada keadilan. Terma keadilan sebagaimana disebut Hoover sebagai kemakmuran secara ekonomi dan politik berarti jauh dari konflik (Hoover: 2004, 101). Sebagaimana media dipersepsikan sebagai satu-satunya sumber informasi bagi masyarakat sipil, media adalah yang menentukan bagaimana seharusnya masyarakat memandang hubungan antara agama dan politik. Manakala dipandang agama dan Ulama bukan merupakan artikulasi budaya dari suatu negara, maka dapat disimpulkan agama seharusnya tidak terpisah dengan politik.

Adapun definisi dari “Ulama” sebagaimana dikemukakan oleh Qasim Zaman dalam “Ulama In Contemporary Islam” adalah kaum intelektual keagamaan¹ (Zaman: 2002, 6). Lebih jauh daripada itu diketahui bahwa kegiatan intelektual keagamaan dekat dengan organisasi-organisasi massa keislaman yang memiliki tujuan tidak hanya untuk mempromosikan tujuan dari organisasi tersebut melainkan untuk mengedukasi masyarakat terkait hukum-hukum Islam yang berlaku. Definisi ulama ini diketahui mengalami pergeseran dibandingkan dengan tradisi lama yang menyatakan bahwa ulama adalah pemegang syariat hukum yang bertugas untuk menjaga keberlangsungan hukum Alquran. Merujuk kepada definisi Ulama sebagai intelektual keagamaan, sejauh mana sesungguhnya peran dari Ulama terhadap politik? Apakah secara konseptual, definisi dari Ulama itu menjadi *decision maker* atau penentu kebijakan politik? Jika demikian maka bagaimana konseptualisasi Ulama dapat menjelaskan intensitas pengaruh Ulama di Indonesia?

Qasim Zaman (2002) menyebutkan bahwa politik moderen di negara-negara dengan budaya Islam kuat mengakar ke dalam politik dari negara yang bersangkutan, termasuk di dalamnya preferensi dari pemilihan calon pemimpin.

The emphasis on relatively new and emerging intellectuals and activists should not, however, obscure the significance of a community of religious scholars that has existed in Muslim societies for more than a thousand years and, in recent decades, has also witnessed a resurgence of great moment. As increasingly prominent actors on the contemporary scene in Muslim societies, the ‘ulama—their transformations, their discourses, and their religiopolitical activism—can, indeed, only be neglected at the cost of ignoring or misunderstanding crucial facets of contemporary Islam and Muslim politics (Zaman: 2002, 10).

Talal Asad dalam tesisnya yang berjudul “Formations of the Secular” menyatakan bahwa memisahkan agama dengan politik adalah konsekuensi dari modernitas sebagai

¹ Merupakan terjemahan dari konsep “religion intellectuals sebagaimana ”

bentuk kekhawatiran kaum kosmopolitan terhadap kekacauan (Asad: 2003, 181). Lebih jauh daripada itu Asad mengklaim bahwa sekularisme bukan merupakan ide yang universal. Acapkali masyarakat berasumsi bahwa memisahkan agama dengan politik, atau menjauhkan figur pemimpin dari tujuan-tujuan agamis akan membawa perdamaian di Indonesia. Berkebalikan dengan asumsi tersebut, Asad menyebutkan bahwa kekacauan sosial dan ketidakseimbangan kekuatan antara pemimpin dengan rakyat justru diakibatkan oleh sekularitas (Asad: 2003, 9).

Dalam rangka menganalisis sejauh mana pengaruh ulama terhadap tingkat elektabilitas pemimpin negara, terlebih dahulu kita harus memperhatikan dengan seksama tentang bentuk dan intensitas dari pengaruh itu sendiri. Talal Asad selanjutnya menggunakan diksi “ancaman” sebagai ukuran dari pengaruh. Argumennya adalah intensitas dari ancaman itu bergantung kepada bagaimana agama sendiri dimunculkan sebagai sebuah wacana di ruang publik. Agama disebut mampu berbaur dengan nilai-nilai modernitas apabila berfungsi sebagai landasan nilai dan moral dari warga negaranya (Asad: 2003, 185). Dengan demikian maka di negara tersebut sedang tidak terjadi sekularisme dan pengaruh ulama tidak berdampak kepada perpecahan sosial. Di sisi lain sebagaimana dicontohkan oleh Mesir jika agama menindas masyarakat sipil dan terjadi kekerasan-kekerasan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu maka agama merupakan bentuk perlawanan terhadap nilai-nilai modernitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara yang berlandaskan kepada hukum dan perundang-undangan, Ulama bukan figur politik yang menentukan kebijakan maupun produsen dari produk-produk hukum di Indonesia. Meski demikian, keberadaan ulama di balik figur pemimpin adalah wajar adanya.

Menilik dasar negara Indonesia, Pancasila sedianya mencerminkan bahwa dasar bernegara di Indonesia adalah “Ketuhanan”. Sila pertama dari Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dasar pembentukan bangsa terletak kepada kekuatan utama Tuhan. Ketuhanan oleh Carl Schmitt (1985) dalam tesisnya yang berjudul *Political Theology* didefinisikan sebagai struktur dasar yang melandasi struktur-struktur kepemimpinan yang lain.

Lebih jauh daripada itu, penting kiranya menilai modalitas dari kedua pasangan calon melalui elemen lain yang lebih substantif seperti visi dan misi. Tidak hanya menampilkan arah kerja dari kedua pasangan calon, visi dan misi juga dapat dicermati sebagai strategi pemimpin untuk menentukan arah kerja 5 tahun ke depan selama kepemimpinannya.

Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui visi dan misi dari kedua pasangan Capres-Cawapres dengan mengakses portal berita online. Salah satu portal berita online yang mempublikasikan visi dan misi dari kedua Capres dan Cawapres adalah www.idntimes.com. Pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Kerja menyampaikan visi dan misi sebagai berikut:

Tabel.1
Visi dan Misi gan Jokowi dan Ma'ruf Amin

VISI
Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.
MISI
<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sumber: *Olah Penulis*

Masih selaras dengan jargon populer Jokowi yakni “kerja, kerja, kerja”, pembangunan struktur ekonomi dan gotong royong menjadi cita-cita utama dari pemerintahan

Jokowi. Visi dan misi tersebut selanjutnya selaras dengan program Nawa Cita. Program Nawa Cita adalah sembilan fokus utama kerja dari Presiden Jokowi yang telah populer sejak periode pertama pemerintahannya.

Adapun muatan dari program Nawa Cita tersebut adalah: 1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2. Kami akan membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4. Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8. Kami akan melakukan revolusi karakterbangsa, 9. Kami akan memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Sumber: kpu.go.id). Pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno yang populer dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur mengusung visi dan misi sebagai berikut:

Tabel. 2

Visi dan Misi Pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno

VISI
Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang adil, makmur bermartabat, religius, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat dibidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antar warga negara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan rasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
MISI
1. Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan ekonomi politik sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan ekonomi politik sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi.
4. Membangun keadilan dibidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.
6. Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia.

Sumber: *Hasil Olah Penulis*

Selaras dengan Jokowi dengan program Nawa Cita-nya, pasangan Prabowo-Sandi juga memiliki komitmen tertulis yang disampaikan kepada masyarakat melalui Ijtima Ulama. Pada tanggal 16 September 2018, Ulama yang tergabung dalam GNPF menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan Prabowo-Sandi dan menggelar Ijtima Ulama kedua. Portal berita online kompas.com memuat dukungan dari GNPF murni untuk tujuan kemaslahatan Umat Muslim di Indonesia. GNPF menitipkan 17 poin dalam Pakta Integritas yang disematkan ke dalam dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandi. Adapun poin-poin dalam 17 pakta Integritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,
2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesucilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia,

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan,
4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional,
5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia,
6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,
7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme,
8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945,
9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya,
10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara,
12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan,
13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan,
14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional,
15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, 16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada

jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulauan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Serta, memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah disangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman,

16. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara (sumber: nasional.kompas.com, 16 September 2018).

Berbeda dengan Jokowi yang memfokuskan agenda pemerintahan kepada permasalahan ekonomi, melalui Ijtima Ulama Prabowo menunjukkan upaya untuk mengikhtarkan perjuangan reformasi dan hak asasi manusia berlandaskan hukum-hukum Islam. Sesuai dengan tesis Asad yang menyatakan bahwa fungsi ulama moderen adalah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik suatu negara dan tidak berfungsi sebagai penentu kebijakan, sepatutnya nilai-nilai dari Ulama di balik kedua pasangan calon tidak menjadi bahan pertimbangan. Masyarakat kini dihadapkan kepada dua pilihan yakni memperbaiki masalah ekonomi bersama Jokowi atau memperbaiki reformasi hak asasi manusia dalam konteks Islam bersama Prabowo.

Pergeseran penilaian masyarakat terhadap Ulama yang berakibat kepada biasanya popularitas dan elektabilitas secara lebih lanjut mengafirmasi tesis Hoover (2004) terkait sumbangsih media di dalamnya. Fenomena pasca 212 yang menjatuhkan status tersangka penistaan agama kepada Ahok menjadi momentum dimana masyarakat Indonesia menunjukkan ketidakpercayaannya kepada ulama-ulama PA 212 yang selanjutnya lekat dengan GNPF. Terdapat kekhawatiran tentang pendirian negara khilafah dengan adanya dukungan GNPF di balik sosok Prabowo. Sebuah bias yang seharusnya tidak beredar di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Menilai elektabilitas kedua pasangan calon seharusnya didasarkan kepada modalitas dari dua pasangan calon. Modalitas tersebut bisa dilihat dari komitmen tertulis dari

kedua pasangan calon. Visi, misi, dan fenomena lain yang menghasilkan komitmen tertulis seharusnya menjadi tolak ukur pertama dalam menilai modalitas kedua pasangan calon.

Menjadi sebuah kesalahan besar apabila preferensi terhadap Jokowi dan Prabowo didasarkan dari pengaruh segolongan Ulama di balik keduanya. Dukungan dari para ulama itu tak ubahnya sebagai strategi untuk menaikkan popularitas saja sehingga masyarakat kerap kali bias dengan ukuran elektabilitas yang sesungguhnya. Menjadi berbahaya pula apabila pengukuran tentang eksistensi dari para Ulama itu didasarkan dari pemberitaan via media sosial saja.

Lebih penting lagi, masyarakat perlu melihat bagaimana cara kedua pasangan calon dapat memberikan penjelasan terkait visi dan misinya, apakah selama ini visi misi yang disampaikan ke publik sudah seiring dengan perjalanan politik dari kedua pasangan calon. Disini calon pemilih dipandang perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tertulis di bawah ini:

1. Apakah visi dan misi dari kedua pasangan calon itu sesuatu yang benar-benar baru?
2. Apakah sebelum mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres sebelumnya sudah ada modalitas dari kedua calon yang telah menggambarkan visi misi tersebut?
3. Berdasarkan apa visi dan misi itu dibentuk?

Tentu saja hak pilih dari masyarakat sangat perlu dimaksimalkan. Penelitian ini merupakan sarana untuk menyajikan pembenaran bahwa nilai-nilai di balik Ulama yang melekat kepada popularitas dari kedua pasangan calon seharusnya tidak mengaburkan modalitas dari kedua pasangan calon yang sesungguhnya. Calon pemilih sangat diharapkan untuk memperhatikan konsumsi media secara cerdas dan tidak mengandalkan hanya kepada satu sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim (2018) "Sandiaga Ungkapkan Tak Gentar Hadapi Survey Sementara" diakses pada 13 Oktober 2018 melalui www.tempo.co

- Anonim (2018) “Inilah Visi dan Misi Kedua Capres” diakses pada 13 Oktober 2018 melalui www.idntimes
- Anonim (2018) “MUI Terkait #2019gantipresiden diakses tanggal 12 Oktober 2018 melalui www.cnnindonesia.com
- Anonim (2017) “Pengejawantahan NAWA CITA Jokowi” diakses tanggal 12 Oktober 2018 melalui www.kpu.go.id
- Anonim (2018) “Prabowo Hadiri Ijtima Ulama II” diakses tanggal 12 Oktober 2018 melalui www.nasional.kompas.com
- Anonim (2018) “Visi Misi Jokowi Versus Prabowo” diakses tanggal 12 Oktober 2018 melalui www.kpu.go.id
- Asad, Talal (2003). *Formations of The Seculars*. California: Stanford University Press.
- Asad, Talal (2004). *Ulamas and Politics*. California: Stanford University Press
- Hoover, Stewart M (2004). *Religion in The Media Age*. New York: Routledge
- Hoover, Stewart M (1997). *Rethinking Media, Religion and Culture*. New York: Routledge
- Schmitt, Carl dalam Stewart Hoover (1985). *Political Theology*. New York: Routledge
- Sukmana, Yoga (2018) “Jokowi Ungguli Prabowo Di Kantong Pemilih Muslim” diakses pada 13 Oktober 2018 melalui www.kompas.com
- Zaman, Muhammad Qasim (2002). *The Ulama In Contemporary Islam*. New Jersey: Princeton University Press